

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan daerah yang diamanatkan oleh undang undang pemerintahan daerah adalah efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu instrument penting dalam mewujudkan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB) yang mana menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai semua kegiatan pembangunan.

Anggaran adalah rencana kegiatan perusahaan. Rencana ini mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain (Hanum, Z. 2010). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah merupakan tonggak dari sebuah perencanaan pembangunan suatu daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. APBD ialah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan Pemerintah Daerah sebagai catatan penerimaan dan pengeluaran keuangan dalam melaksanakan otonomi daerah (Nuzulul Siswo Abdulaziz, 2021).

Analisis kinerja keuangan pemerintah merupakan pengukuran atau penilaian terhadap kinerja pemerintah mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan pada bidang keuangan dalam jangka waktu tertentu. Analisis kinerja

keuangan sangat penting bagi pemerintah karena dengan analisis kinerja ini pemerintah dapat mengetahui bagaimana kinerja pemerintahannya selama periode waktu tertentu. Dengan melakukan analisis kinerja keuangan, pemerintah dapat melihat bagaimana pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan, untuk mengevaluasi kinerja pemerintahannya, serta sebagai pedoman untuk perbaikan kinerja keuangan pada periode berikutnya (Maulina & Rhea, 2019).

Salah satu cara untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Analisis Rasio Keuangan Daerah Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya (Machmud et al., 2014).

Penggunaan rasio keuangan daerah sebagai alat analisis kinerja keuangan dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi (Anugeraheni & Yuniarta, 2022). Analisis rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi rasio efisiensi keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, derajat desentralisasi, rasio efektifitas PAD, dan rasio efisiensi (Sartika, 2019).

Adanya analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi, rasio kinerja

keuangan daerah akan membantu pemerintah dalam mengukur kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat melalui laporan realisasi anggaran yang menyajikan banyak informasi terkait pendapatan, transfer, defisit, surplus, serta pembiayaan pada suatu entitas.

Penelitian dilakukan di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data melalui dokumentasi, yaitu laporan realisasi anggaran pada tahun 2019-2023.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan bekerja untuk melaksanakan sebagian tugas dalam hal bidang pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja, verifikasi, perbendaharaan dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan badan. Kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dijadikan sebagai bukti kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Penyusunan terhadap laporan pertanggungjawaban akan dilakukan pemeriksaan oleh BPK atas pelaksanaan APBD. BPKAD juga melaksanakan rekonsiliasi atas realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan, yang kemudian akan disusun berdasarkan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu BPKAD juga melaksanakan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Berikut adalah gambaran perkembangan APBD Pemerintahan Kabupaten

Timor Tengah Selatan selama lima tahun anggaran :

Tabel 1.1.
Realisasi Pendapatan Daerah Dan Belanja Daerah
Kabupaten Timor Tengah Selatan
(Dalam Miliaran Rupiah)

Keterangan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Total Pendapatan Daerah (Dalam Miliaran Rupiah)	1.505,22	1.431,45	1.370,55	1.401,05	1.532,50
Pendapatan Asli Daerah (Dalam Miliaran Rupiah)	77,59	64,10	65,66	36,40	61,54
Transfer(Dalam Miliaran Rupiah)	1.320,33	1.266,92	1.207,06	1.241,46	1.340,78
Belanja(Dalam Miliaran Rupiah)	1.497,05	1.466,02	1.402,62	1.414,23	1.382,79

Sumber Data : Portal djpk, Kabupaten TTS

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sesuatu yang dasar dalam mempengaruhi APBD dikarenakan kontribusi PAD Terhadap APBD sangatlah besar, semakin besar PAD maka semakin minim suatu daerah yang bergantung kepada pemerintah pusat (Sari el al, 2020).

Kemampuan daerah dalam menggali dan memanfaatkan potensi daerah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah tentunya dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah yang dihasilkan daerah memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan sehingga pemerintah daerah mampu meminimalkan ketergantungannya terhadap bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat. Dan belanja daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan menunjukkan bahwa belanja rutin (operasi) masih lebih besar dibandingkan dengan belanja modal (pembangunan). Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji ASN.

Tingkat belanja modal (pembangunan) yang tinggi memberikan gambaran dari infrastruktur dan sarana yang dibangun. Pada umumnya apabila tingkat pembangunan tinggi, maka akan meningkatkan pelayanan yang diterima oleh masyarakat setempat yang akan memberikan dampak yang baik terhadap kinerja daerah tersebut. Hal ini membuktikan, semakin banyak belanja modal yang digunakan maka kemampuan dalam mengukur kinerja keuangan mengalami peningkatan (Sari et al, 2020).

Penelitian terdahulu oleh *Rindang Arumdari (2019)* “Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan, Pada Tahun 2013-2017”

Hasil penelitian Kinerja keuangan dari rasio kemandirian di tahun 2013-2017 termasuk kategori pola hubungan partisipatif, rasio efektivitas ditahun 2013-2017 termasuk kurang efektif, Pertumbuhan pendapatan daerah dari tahun 2014-2017 merupakan pertumbuhan negatif karena cenderung mengalami penurunan.

Penelitian terdahulu oleh *Arfan Pasetya (2019)* “Analisis Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Rasio Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2017” Hasil penelitian rasio mandiri 2008-2009 belum mandiri. Rasio Efektivitas 2008-2011 sudah termasuk efektif, tapi di tahun 2012 mengalami penurunan dan belum efektif.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik mengambil judul: **“Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan T.A 2019-2023.**

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: **“Rasio Keuangan Daerah Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan T.A 2019-2023”**

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan ditinjau dari rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2019-2023?
- b. Bagaimana kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan ditinjau dari rasio efektivitas pada tahun 2019-2023?
- c. Bagaimana kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan ditinjau dari rasio pertumbuhan pada tahun 2019-2023?
- d. Bagaimana kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan ditinjau dari rasio efisiensi pada tahun 2019-2023?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk Menganalisis kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan ditinjau dari rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2019-2023?
- b. Untuk Menganalisis kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan ditinjau dari rasio efektivitas pada tahun 2019-2023?
- c. Untuk Menganalisis kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan ditinjau dari rasio pertumbuhan pada tahun 2019-2023?
- d. Untuk Menganalisis kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan ditinjau dari rasio efisiensi pada tahun 2019-2023 ?

1.4.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Akademik

Memberikan manfaat bagi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi berkaitan dengan Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah.

b. Manfaat Praktis

Memberikan Manfaat bagi Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten
Timor Tengah Selatan